

Analisis Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

Dikson Junus¹, Nirmala A. Sahi², Muh. Fachri Arsjad³, Abdul Wahab Podungge⁴, Muten Nuna⁵

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep reformasi birokrasi dalam meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato belum dilaksanakan secara maksimal, dimana hal tersebut dapat dilihat dari : 1). Kelembagaan organisasi, 2). Kapasitas maupun kapabilitas SDM, 3). Pemahaman terhadap teknologi, 4). Pelaksanaan reward and punishment, dan 5). perbaikan etika dan moral yang masih perlu untuk dimaksimalkan serta ditingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato agar dapat memaksimalkan tupoksinya, khususnya dalam konsep reformasi birokrasi saat ini, dimana dibutuhkan upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintah, diantaranya penataan kelembagaan yang baik dan sesuai kebutuhan, pemberian penguatan maupun pembinaan kepada aparatur secara berkesinambungan, serta pelaksanaan system reward and punishment secara baik dan teratur.

Kata Kunci: *Reformasi Birokrasi, Kompetensi, Sumber Daya Manusia;*

Copyright (c) 2022 **Dikson Junus**

✉ Corresponding author :

Email Address : diksonjunus@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki Era Globalisasi. Oleh karena itu, sistem administrasi Indonesia, dituntut untuk mempersiapkan diri, membenahi sistem administrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kesiapan sistem administrasi ini, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai ujung tombak harus mampu “membentengi diri” di berbagai bidang dan salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintahnya (Sumber Daya Manusia) dengan cara melakukan reformasi birokrasi. (Haniah, 2014)

Reformasi birokrasi adalah salah satu strategi penting dilakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Reformasi birokrasi yang telah lama digulirkan sebetulnya memiliki sasaran mendasar berupa perubahan mindset (pola pikir) SDM aparatur dan sistem yang berjalan yang dapat mengendalikan organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Namun sasaran utama ini hingga kini terkendala dengan adanya kelemahan kelembagaan berupa kecenderungan mengutamakan pendekatan struktural daripada pendekatan fungsional. faktor terpenting dalam penataan organisasi justru adalah kualitas dan kemampuan SDM dalam merumuskan visi misi dan strategi organisasi, analisis beban kerja. (Aldenila, 2014)

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya mencapai kesejahteraan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. (Aldenila, 2014)

Paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa titik berat penyelenggaraan desentralisasi diletakkan pada pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini sesuai dengan batasan pengertian tentang desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah yang bersifat desentralistik memerlukan adanya peningkatan kompetensi Aparatur pemerintahan daerah serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Andi, 2019)

Salah satu konsekuensi dengan adanya paradigma yang dibawa oleh Undang-Undang tersebut adalah perlunya Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dominannya posisi dan peran birokrasi pemerintah dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa menuntut agar birokrasi tersebut mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi dan menjalankan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat efisiensi, efektifitas yang setinggi mungkin dibarengi dengan orientasi pelayanan, bukan orientasi kekuasaan, dan menampilkan perilaku yang fungsional. Pemerintah dengan wacana Reformasi Birokrasi yang telah lama digulirkan sebetulnya memiliki sasaran mendasar berupa pola pikir sumber daya

manusia (SDM) aparatur dan sistem yang berjalan yang dapat mengendalikan organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pegawasan, dan pelayanan publik. (Andi, 2019)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen yang sungguh dari berbagai pihak yang terlibat di dalam pemerintahan. Terdapat delapan area perubahan yang harus dilakukan perbaikan oleh semua kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah meliputi: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan perbaikan dalam delapan area tersebut diharapkan mampu memenuhi pencapaian sasaran pemerintah sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2024 yaitu: Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan perbaikan manajemen organisasi dan SDM sehingga tercapai keseimbangan antara unit/stuktur organisasi. (Agung, 2020).

Birokrasi merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki dinamika sesuai dengan lingkungannya. Perkembangan demokrasi yang membawa konsep kebebasan, partisipasi, kesetaraan dan rasionalitas serta semakin kritisnya masyarakat menuntut pemerintah untuk memiliki sistem birokrasi yang memiliki berbagai macam inovasi dan menyediakan SDM yang jujur dan terbuka. Namun untuk mencapai tahapan tersebut diperlukan upaya yang sungguh sungguh dari berbagai pihak sebab masih terdapat permasalahan dari internal birokrasi diantaranya pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, sistem organisasi dan manajemen pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum, rendahnya kesejahteraan PNS serta berbagai peraturan perundang undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (Sunarno dalam Agung, 2020).

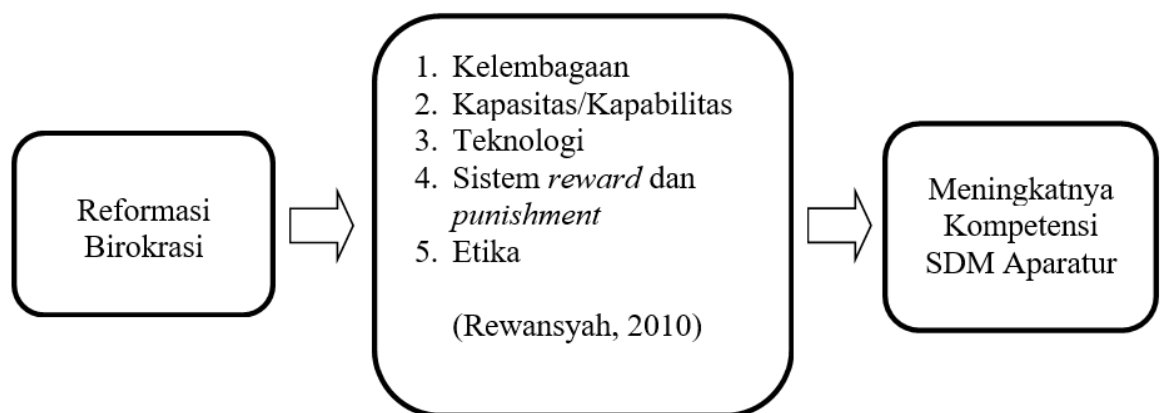
Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab, profesional, birokrasi yang efisien dan efektif, dan menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Secara konseptual dalam menciptakan hal tersebut dimulai dari redefinisi visi, misi dan strategi, kajian restrukturisasi pemisahan dan penggabungan serta penajaman fungsi, kajian analisis beban kerja unit-unit organisasi. SDM aparatur sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan memegang peranan penting dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karenanya, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan atau manajemen SDM aparturnya. Reformasi pengelolaan SDM aparatur inimerupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik. (Aldenila, 2014)

Salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah sumber daya manusia aparatur. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sumber daya organisasi yang paling berharga sebagaimana dikatakan Turner dan Hulme (1997: 116): *organization's most valuable resources are its staff*. Staf di sini adalah sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Sebuah organisasi tanpa staf, maka organisasi tidak akan berjalan, karena staf lah yang melakukan tugas, koordinasi dan mengatur input menjadi output. Untuk itu, pengembangan dan manajemen SDM mendapat perhatian besar dalam reformasi dalam rangka mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan. (Haniah, 2014)

Oleh sebab itu dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penerbitan Undang-undang ASN yang menggantikan UU No. 43 tahun 1999 adalah untuk mewujudkan tata kelola aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan memper-tanggung jawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. (Erwin, 2019)

Keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara keseluruhan tentunya dipengaruhi pula oleh kualitas Sumber Daya Manusia dalam organisasi dalam hal ini SDM Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, dimana mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, maka kompetensi menjadi salah satu aspek yang menentukan keberhasilan ASN dalam melakukan kinerja pelayanan terhadap masyarakat. Semenara itu, salah satu ukuran suatu pekerjaan dilakukan secara efektif adalah dengan mengukur kompetensi ASN itu sendiri, dengan mengetahui kompetensi yang dimiliki ASN maka perencanaan SDM Aparatur Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato akan lebih baik hasilnya.

Gambar 1 : Kerangka Pikir



Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Dimana pertimbangan memilih lokasi tersebut karena terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya konsep reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia aparatur kecamatan, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan melalui penelitian dan pengkajian. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana konsep reformasi birokrasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab, profesional, birokrasi yang efisien dan efektif, dan menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Secara konseptual dalam menciptakan hal tersebut dimulai dari redefinisi visi, misi dan strategi, kajian restrukturisasi pemisahan dan penggabungan serta penajaman fungsi, kajian analisis beban kerja unit-unit organisasi. SDM aparatur sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan memegang peranan penting dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karenanya, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan atau manajemen SDM aparturnya.

Keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara keseluruhan tentunya dipengaruhi pula oleh kualitas Sumber Daya Manusia dalam organisasi dalam hal ini SDM Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, dimana mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, maka kompetensi menjadi salah satu aspek yang menentukan keberhasilan ASN dalam melakukan kinerja pelayanan terhadap masyarakat. Semenara itu, salah satu ukuran suatu pekerjaan dilakukan secara efektif adalah dengan mengukur kompetensi ASN itu sendiri, dengan mengetahui kompetensi yang dimiliki ASN maka perencanaan SDM Aparatur Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato akan lebih baik hasilnya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini peneliti akan menjelaskan beberapa temuan tentang reformasi birokrasi dalam meningkatkan kompetensi SDM aparatur di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato yaitu sebagai berikut :

1. Kelembagaan

Inisiatif pemerintah untuk melembagakan upaya reformasi birokrasi merupakan bentuk upaya penerapan reformasi birokrasi secara terstruktur dan terlembagakan dengan menggunakan kerangka manajemen strategis untuk menjamin keberlangsungannya. Babak ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan koherensi antara reformasi birokrasi dan pencapaian hasil pembangunan nasional, sekaligus agregat pembangunan dari daerah, dimana hal tersebut tentunya terus memperhatikan tata laksana birokrasi dengan menempatkan seseorang sesuai dengan bidang maupun keahliannya masing-masing, sehingga upaya reformasi dapat dirasakan juga oleh masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irfan Lalu, SE selaku Camat Buntulia, bahwa dalam menata kelembagaan birokrasi dimana salah satu hal yang harus kita perhatikan yaitu kesesuaian penempatan seseorang dalam sebuah jabatan berdasarkan bidang ilmu maupun keahlian yang dimiliki, agar hal ini juga dapat meningkatkan kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

“Penempatan seseorang dalam suatu jabatan berdasarkan keilmuan yang dimiliki sangat penting, karena jika seseorang bekerja tidak sesuai ilmu dan bidangnya maka hasilnya akan tidak sempurna. Oleh karena itu, kelembagaan birokrasi ini tetap menjadi perhatian khusus”. (Wawancara : Senin, 11 April 2022, Pukul 11.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mohamad Maa, SE.I selaku Kepala Seksi Pemerintahan, bahwa menempatkan seseorang berdasarkan bidang ilmu yang dimiliki adalah sangat tepat, karena dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki itulah akan mempermudah seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, dan tentunya hal ini juga dapat membantu seseorang untuk terus meningkatkan kompetensinya.

“Sangatlah tepat apabila kita menempatkan seseorang dalam sebuah jabatan berdasarkan bidang keilmuannya, karena kalau tidak sesuai dengan bidang dan ilmunya semua tidak akan berjalan dengan baik. Makanya dengan melihat hal ini, dimana kami sebagai pemerintah kecamatan terus berbenah, agar kelembagaan birokrasi ini dapat berjalan dengan baik pula”. (Wawancara : Selasa, 12 April 2022, Pukul 11.00 Wita).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung di lapangan telah dianalisis bahwa, menempatkan seseorang berdasarkan bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki adalah sangat tepat, agar hal ini juga dapat meningkatkan kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Sehingga, dalam tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur dimana pemerintah Kecamatan Buntulia harus terus berbenah, agar kelembagaan birokasinya dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, Pemerintah Kecamatan Buntulia harus terus berbenah dalam menatakelola kelembagaan birokasinya, dengan cara selalu memperhatikan penempatan pegawai berdasarkan disiplin maupun bidang ilmu yang dimiliki, agar segala aktivitas pekerjaan bisa berjalan serta terselesaikan dengan baik.

2. Kapasitas/Kapabilitas

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan

transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya mencapai kesejahteraan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irfan Lalu, SE.I selaku Camat Buntulia, bahwa pemerintahan Kecamatan Buntulia cukup memiliki SDM yang mempunyai kapasitas maupun kapabilitas (kemampuan) yang memadai. Karena dengan kemampuan SDM yang dimiliki ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur Kecamatan Buntulia itu sendiri.

“Kemampuan sumber daya manusia sangatlah diperlukan dalam meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, dalam menunjang kapasitas maupun kapabilitas aparatur, dimana pemerintah Kecamatan Buntulia terus mendorong pegawainya untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan pelatihan, agar dapat mengasah dan menambah wawasan dan keterampilan yang dimiliki”. (Wawancara : Senin, 11 April 2022, Pukul 11.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Fitri Pratiwi Tantu, A.Md selaku Kasubag Keuangan dan Program, bahwa upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, diperlukan usaha untuk penguatan kapasitas maupun kapabilitas aparatur itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kecamatan Buntulia, dimana para pegawai kecamatan terus didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

“Pemerintah Kecamatan Buntulia memiliki SDM aparatur yang mempunyai kapasitas maupun kapabilitas yang cukup baik. Karena aparturnya terus didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, sehingga hal ini mampu meningkatkan kompetensi SDM aparatur itu sendiri. Oleh karena itu, dengan mengikuti berbagai pelatihan ini diharapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan serta pengalaman, sehingganya aparatur bisa bekerja lebih baik dan professional”. (Wawancara : Selasa, 12 April 2022, Pukul 10.30 Wita).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, pemerintahan Kecamatan Buntulia cukup memiliki SDM yang mempunyai kapasitas maupun kapabilitas (kemampuan) yang memadai. Akan tetapi hal ini masih terus ditingkatkan, dengan selalu mendorong aparatur untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, agar dapat mengasah dan menambah pengetahuan guna peningkatan kompetensi SDM itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, Pemerintah Kecamatan Buntulia tetap terus mendorong aparturnya untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Baik memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut dalam berbagai kegiatan pelatihan maupun terus memberikan motivasi kepada setiap aparat agar terus mengasah kemampuan demi peningkatan kompetensi yang dimiliki.

3. Teknologi

Tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang kian modern juga memicu daerah untuk mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang mantap dan berbasis pada Informasi Teknologi (IT). Dengan kemajuan ini, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan informasi dan kebutuhan data akan perkembangan kepegawaian di daerah secara real time kapanpun dibutuhkan. Terselenggaranya reformasi birokrasi mengandung maksud agar birokrasi pemerintah dapat berlangsung dengan baik sesuai kebaikan prinsip-prinsip manajemen modern yang semakin baik dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang memang merupakan tugas utama pemerintah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irfan Lalu, SE.I selaku Camat Buntulia, bahwa saat ini teknologi menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam menunjang kinerja pemerintah kecamatan, dimana setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pasti berkenaan dengan teknologi, sehingga perkembangan teknologi ini juga sangat membantu dan mempermudah para pegawai dalam bidang pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki, agar dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada.

“Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat. Sehingga para pegawai di Kantor Camat Buntulia terus didorong untuk dapat menguasai teknologi, khususnya bidang administrasi, keuangan dan operator system. karena sekarang serba ITC dan hal ini juga dapat membantu para pegawai dalam bidang pelayanan sekaligus dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki”. (Wawancara : Senin, 11 April 2022, Pukul 11.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mohamad Maa, SE.I selaku Kepala Seksi Pemerintahan, bahwa dalam konsep reformasi birokrasi ini dimana pemerintah dituntut untuk dapat menguasai teknologi yang telah berkembang begitu pesat hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Buntulia terus memperhatikan kualitas SDM khususnya penguasaan mereka terhadap teknologi, sebab hal ini dapat menunjang pekerjaan serta dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

“Teknologi pada zaman sekarang memang sangat dibutuhkan, karena itu bagian dari upaya yang dapat menunjang pekerjaan dan bisa meningkatkan potensi yang ada. Sehingga pemerintah Kecamatan Buntulia terus berupaya untuk memberikan penguatan kepada para pegawainya untuk bisa menguasai teknologi”. (Wawancara : Selasa, 12 April 2022, Pukul 11.00 Wita).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung di lapangan telah dianalisis bahwa, dalam konsep reformasi birokrasi ini dimana pemerintah Kecamatan Buntulia dituntut untuk dapat menguasai teknologi yang telah berkembang begitu pesat hingga saat ini. Dimana teknologi menjadi salah satu pilar yang sangat penting

dalam menunjang kinerja pemerintah kecamatan, karena setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pasti berkenaan dengan teknologi.

Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan Buntulia, masih perlu untuk diberikan penguatan terhadap penguasaan teknologi yang sejauh ini telah berkembang sangat pesat, karena selain dapat membantu mempermudah sebuah pekerjaan, juga hal ini dapat menunjang kinerja pegawai serta dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

4. Sistem reward dan punishment

Bahwa untuk mencapai tujuan keberhasilan reformasi birokrasi pada setiap organisasi di pemerintah, dimana salah satunya adalah pelaksanaan reward and punishment. Organisasi pemerintah terhadap peningkatan kinerja, dengan mewujudkan pelaksanaan reward atau penghargaan yang berdampak pada peningkatan karier pegawai, diberikan atas dasar prestasi pegawai berupa hadiah yaitu berupa kenaikan pangkat, promosi jabatan dan yang lain-lain yang terkait didalam peningkatan kinerja pegawai, dengan tujuan agar dapat menciptakan motivasi pegawai untuk berprestasi memotivasi kepuasan kerja pegawai.

Sedangkan Dalam hal untuk punishment diatur pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, untuk diwujudkan dalam penegakan disiplin PNS. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib apabila tidak ditaati dan dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi hukuman disiplin. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar reward dapat diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang ASN tersebut, dan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan keras dan tegas.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irfan Lalu, SE.I selaku Camat Buntulia, bahwa pelaksanaan reward and punishment terhadap para pegawai itu sangat penting, karena hal ini dapat memberikan spirit dan motivasi tersendiri kepada setiap pegawai untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya. Oleh karena itu, ketika kedisiplinan dan kinerja pegawai meningkat, maka hal ini juga dapat berpengaruh pada kualitas SDM dan kompetensi yang dimiliki.

“Reward and punishment harus dilaksanakan secara adil dan menyeluruh agar aparatur termotivasi dan merasa dihargai. Apalagi hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur, dan ini juga dapat meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki”. (Wawancara : Senin, 11 April 2022, Pukul 11.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Deysi Natalia Yasin, SM selaku Operator SIMDA, bahwa pelaksanaan reward and punishment ini sangat baik untuk meningkatkan kompetensi SDM, karena jika kedua kebijakan ini dijalankan secara baik dan benar, maka akan berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan dalam bekerja serta menjadikan motivasi tersendiri bagi setiap pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dibidangnya.

“Pelaksanaan reward and punishment sangat penting untuk memotivasi pegawai dalam bekerja. Oleh karena itu, hal demikian menjadi perhatian khusus bagi

pemerintah Kecamatan Buntulia, karena dengan adanya reward and punishment tersebut diyakini dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur di kantor. (Wawancara : Senin, 11 April 2022, Pukul 13.30 Wita).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, pelaksanaan reward and punishment terhadap para pegawai di Kantor Kecamatan Buntulia itu sangat penting, karena hal ini dapat memberikan spirit dan motivasi tersendiri kepada setiap pegawai untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya, serta dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, pelaksanaan reward and punishment terhadap aparatur pemerintah itu sangat penting. Karena setiap pegawai akan termotivasi untuk terus bekerja dengan baik dengan penuh tanggungjawab, dengan kata lain kedisiplinan pegawai akan meningkat, juga berdampak pada peningkatan kompetensi SDM aparatur itu sendiri.

5. Etika

Setiap birokrasi pelayanan publik wajib memiliki sikap, mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi dan asas etis. Birokrat wajib mengembangkan diri sehingga dapat memahami, menghayati dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral, khususnya keadilan dalam tindakan jabatannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang sering dinilai dari tutur kata, sikap dan perilakunya, apakah sejalan dengan nilai-nilai tersebut atau tidak. Begitu pula dalam pemberian pelayanan publik, tutur kata, sikap dan perilaku para pemberi pelayanan sering dijadikan obyek penilaian dimana nilai-nilai tersebut dijadikan ukurannya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irfan Lalu, SE.I selaku Camat Buntulia, bahwa perbaikan etika dan moral aparatur sangat penting diperhatikan, khususnya bagi aparatur pemerintah Kecamatan Buntulia, dimana hal ini merupakan salah satu untuk menumbuhkembangkan sebuah kepercayaan masyarakat kepada setiap aparat dalam melaksanakan tugas keseharian. Oleh karena itu, etika maupun moral aparatur harus diperbaiki dan ditingkatkan agar kompetensi SDM aparatur juga dapat meningkat.

“Dalam hal peningkatan kompetensi SDM aparatur tidak terlepas juga dari baik buruknya pelayanan kepada masyarakat, sehingganya yang perlu diperhatikan disini yaitu perbaikan etika dan moral bagi aparatur pemerintah itu sendiri, agar dapat mengundang kepercayaan dari masyarakat”. (Wawancara : Senin, 11 April 2022, Pukul 11.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yespin Abdullah selaku staf Kantor Camat Buntulia, bahwa dalam hal meningkatkan kompetensi SDM aparatur dibutuhkan sebuah upaya untuk menunjangnya. Dimana salah satu upaya tersebut yaitu dengan cara perbaikan etika dan moral aparatur itu sendiri. Apalagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka yang dibutuhkan disini yaitu

bagaimana perilaku yang baik itu selalu ditunjukkan oleh aparat pemerintah agar masyarakat merasa nyaman dalam menerima pelayanan itu sendiri.

“Perbaikan etika dan moral aparat pemerintah perlu diperhatikan, karena hal ini berdampak pada kualitas pelayanan itu sendiri khususnya dalam upaya peningkatan kompetensi SDM aparat di Kecamatan Buntulia. Oleh karena itu, setiap aparat harus diberikan penguatan maupun pembinaan, agar terus memperhatikan etika berperilaku yang baik dalam melaksanakan tugas keseharian. (Wawancara : Senin, 11 April 2022, Pukul 14.30 Wita).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, perbaikan etika dan moral aparat sangat penting dilakukan, khususnya bagi aparat pemerintah Kecamatan Buntulia, dimana hal ini merupakan salah satu untuk menumbuhkembangkan sebuah kepercayaan masyarakat kepada setiap aparat dalam melaksanakan tugas keseharian. Apalagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka yang dibutuhkan disini yaitu bagaimana perilaku yang baik itu selalu ditunjukkan oleh aparat pemerintah agar masyarakat merasa nyaman dalam menerima pelayanan itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, perbaikan etika dan moral aparat perlu diperhatikan oleh pemerintah Kecamatan Buntulia, karena hal tersebut dapat berdampak pada tingkah laku maupun perilaku aparat dalam melaksanakan tupoksinya, sekaligus hal ini juga dapat meningkatkan kompetensi SDM aparat pemerintah Kecamatan Buntulia itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa konsep reformasi birokrasi dalam meningkatkan kompetensi SDM aparat pemerintah di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu diantaranya : 1). Kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan yang belum efektif karena masih ada juga beberapa pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang ilmunya, sehingga masih perlu beradaptasi dengan tugas yang diberikan, 2). Kapasitas maupun kapabilitas SDM yang masih perlu untuk ditingkatkan dalam memahami tupoksi masing-masing, sehingga masih perlu diberikan penguatan melalui berbagai kegiatan pelatihan, 3). Pemahaman terhadap teknologi yang masih perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, 4). Pelaksanaan reward and punishment yang perlu dilakukan secara adil dan merata, agar aparat merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugas, dan 5). perbaikan etika dan moral aparat yang masih perlu ditingkatkan, agar masyarakat merasa nyaman akan kualitas pelayanan yang diberikan.

Referensi :

- Agung Kurniawan. 2020. "Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik". Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, Agustus.
- Agus Wibowo, 2010, "Menjadi Guru Berkarakter", Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Aldenila, 2014. "Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi di Bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai". Jejaring Administrasi Publik. Th VI. Nomor 1, Januari-Juni.
- Andi A. 2019. "Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2014-2017". Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Erwin R. 2019. "Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng". Penelitian Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMM.
- Feisal Tamin, 2004. "Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara". Jakarta : Belantika.
- Haniah Hanafie, 2014. "Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)". Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Istianto, Bambang. 2010. "Demokratisasi Birokrasi". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Komarudin. 2011. "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik". Dalam Jurnal Sekretariat Negara. No 20.
- Miftah Thoha, 2008. "Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi". Jakarta: Kencana.
- Moeheriono, 2010. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, 2010. "Metotologi Penelitian Kualitatif". Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Rewansyah, Asmawi. 2010. "Reformasi Birokrasi dalam rangka good governance". Jakarta: CV Yusa Intanah Prima.
- Roosje Kalangi, 2015. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 2 No. 1.
- Santosa, Pandji, 2008, "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance". Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti, 2009. "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan". Bandung: PT Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. "Reformasi Pelayanan Publik". Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sumaryadi, I Nyoman. 2016. "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Bogor: Ghalia Indonesia
- Wibowo. 2012. "Manajemen Kinerja". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arsip Kantor Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Tahun 2022.